

**ANALISIS POTENSI KECURANGAN (FRAUD) TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS: DESA SIMPANG
EMPAT, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS)**

**Suharman 1)
Mahyus 2)
Eko Febri Lusiono 3)
U. Ari Alrizwan 4)**

1) Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Jurusan Manajemen Informatika,
Politeknik Negeri Sambas
dzakwanherman@ymail.com

Abstrak: Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur peran sistem pengendalian internal dalam meminimalkan potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus: Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuisisioner. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup menggunakan skala Guttman. Hasil penelitian terkait aspek-aspek pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meliputi: Lingkungan pengendalian dengan skor 0,7268 yang berarti bahwa peran capaian pengendalian internal terhadap terjadinya potensi kecurangan sebesar 72,68% termasuk dalam kategori berperan. Penilaian risiko dengan skor 0,5757 yang berarti bahwa peran capaian pengendalian internal terhadap terjadinya potensi kecurangan sebesar 57,57% termasuk dalam kategori cukup berperan. Aktivitas pengendalian dengan skor 0,6349 yang berarti bahwa peran capaian pengendalian internal terhadap terjadinya potensi kecurangan sebesar 63,49% termasuk dalam kategori berperan. Informasi dan komunikasi dengan skor 0,7083 yang berarti bahwa peran capaian pengendalian internal terhadap terjadinya potensi kecurangan sebesar 70,83% termasuk dalam kategori berperan. Pemantauan pengendalian internal dengan skor 0,6888 yang berarti bahwa peran capaian pengendalian internal terhadap terjadinya potensi kecurangan sebesar 68,88% termasuk dalam kategori berperan. Sedangkan peran ke lima komponen tersebut secara bersama-sama dengan skor 0,6738 atau sebesar 67,38% yang termasuk dalam kategori berperan.

Abstract: Fraud Potential Analysis of Village Financial Management (Case Study: Simpang Empat Village, Tangaran District, Sambas Regency). This study aims to determine and measure the role of the internal control system in minimizing the potential for fraud in village financial management (case study: Simpang Empat Village, Tangaran District). The type of research used is descriptive qualitative research and the type of data used is primary data. Data collection techniques through observation, interviews and questionnaires. The questionnaire used is a closed questionnaire using the Guttman scale. The results of research related

to internal control aspects as stated in Government Regulation number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System include: The control environment with a score of 0.7268 which means that the role of internal control achievements in the occurrence of potential fraud is 72.68% included in the category role. Risk assessment with a score of 0.5757 which means that the role of the achievement of internal control in the occurrence of potential fraud of 57.57% is included in the category of playing a role. Control activities with a score of 0.6349 which means that the role of the achievement of internal control in the occurrence of potential fraud of 63.49% is included in the category of playing a role. Information and communication with a score of 0.7083 which means that the role of the achievement of internal control in the occurrence of potential fraud of 70.83% is included in the category of playing a role. Internal control monitoring with a score of 0.6888, which means that the role of internal control achievements in the occurrence of potential fraud of 68.88% is included in the role category. While the roles of the five components together with a score of 0.6738 or 67.38% are included in the role category.

Kata kunci: Potensi, Kecurangan (*Fraud*), Pengelolaan, Keuangan

Fraud merupakan istilah yang sudah cukup lama dikenal dalam dunia keuangan. *Fraud* dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara melakukan tindakan sengaja yang dapat merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)*, *fraud* adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud tidak selalu sama dengan tindak kriminal. Fraud yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan fraud yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal.*

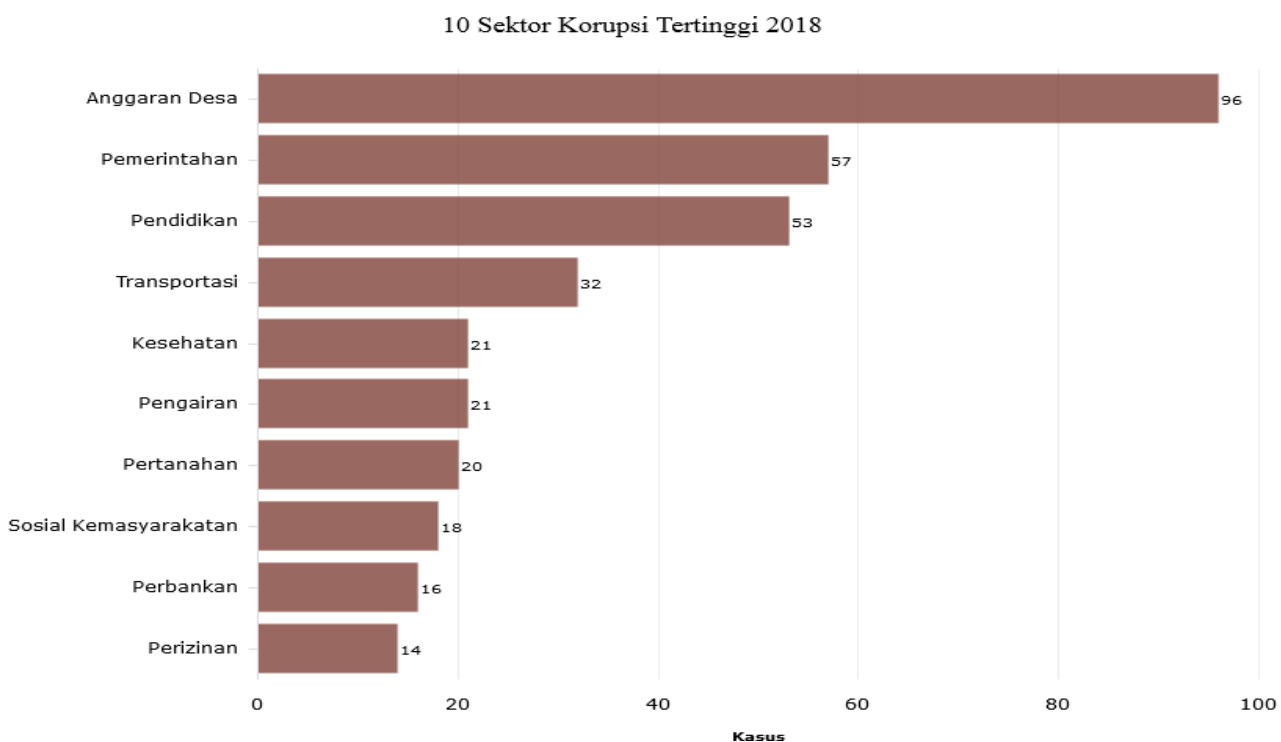
Fraud merupakan istilah yang sudah cukup lama dikenal dalam dunia keuangan. *Fraud* dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara melakukan tindakan sengaja yang dapat merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)*, *fraud* adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu (ACFE, 2016):

1. *Asset Misappropriation*. Jenis ini meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. *Fraudulent Statements*. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif

suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

3. *Corruption*. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).



Gambar 1. 10 Sektor Korupsi tertinggi tahun 2018

Sumber : ICW 2018

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi pada anggaran desa merupakan yang tertinggi di antara sektor lainnya yaitu sebanyak 96 kasus. Kasus tersebut terdiri dari bidang infrastruktur sebanyak 49 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar. Sementara untuk non- infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan nilai kerugian Rp 20 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat potensi masalah terkait dana desa, menyusul kajian yang telah dilakukan pada 2015. **Pertama** terkait masalah regulasi. Masalah muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. **Kedua** potensi masalah dalam tata laksana yaitu, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia dan APBDesa yang disusun tidak

sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. **Ketiga**, kajian lembaga antirasuah juga menemukan potensi masalah dalam hal pengawasan. **Terakhir**, adanya potensi masalah sumber daya manusia (SDM).

Potensi masalah yang dikemukakan oleh KPK seperti diuraikan diatas, diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang saya lakukan sebelumnya yang berjudul *Analisis Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Tangaran)*. Hasil penelitian menunjukkan hasil pengukuran dengan menggunakan angka indeks yang meliputi indeks per parameter yaitu : Kesiapan Perencanaan (KPr), Kesiapan Pelaksanaan (KPl), Kesiapan Penatausahaan (KPt), Kesiapan Pertanggungjawaban (KPj), dan Kesiapan Sumberdaya Manusia (KSDM), menunjukkan hasil seagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks

No	Nama Desa	Hasil Perhitungan Indeks setiap Parameter					Indeks
		KPr	KPl	KPt	KPj	KSDM	
1	Arung Parak	78,57	80,33	82,59	79,52	82,85	80,49
2	Semata	80,29	88,06	88,57	89,05	88,86	85,94
3	Arung Medang	81,75	82,94	85,00	83,75	86,00	83,48
4	Merabuan	76,5	80	82,95	80	74,25	78,52
5	Pancur	90,5	92,35	92,72	94,17	92,75	92,07
6	Tangaran	81,43	83,53	86,23	81,43	85,71	83,48
7	Simpang Empat	71,13	65,59	73,86	69,58	65,25	69,05
8	Merpati	91,00	96,32	98,18	100,00	98,00	95,59

Sumber: Data hasil penelitian

Secara keseluruhan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 desa atau sebesar 75% dengan kategori sangat siap dan 2 desa atau sebesar 25% dengan kategori siap yaitu desa Merabuan dan desa Simpang Empat masing- masing indeks adalah 78,52 dan 69,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa indeks kesiapan terendah ada di desa Simpang Empat. Dengan masih rendahnya indeks kesiapan yang ada di Desa Simpang Empat sehingga potensi *Fraud* yang akan terjadi adalah sebuah kekhawatiran.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengeksplorasi fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan kuisisioner yaitu studi kasus di desa Simpang Empat, untuk memberi gambaran potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Tika (2005: 4) penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis, Peneliti berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan potensi kecurangan atas pengelolaan keuangan desa.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih delapan bulan yakni, yaitu bulan April 2020 sampai November 2020. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dimana sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan atau data yang telah dikumpul dari responden yang sudah ditetapkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan desa Simpang Empat.

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung atau data yang diperoleh dari dokumen arsip resmi dari desa atau instansi yang terkait seperti peta geografis dan demografis lokasi yang akan diteliti maupun dokumen seperti buku-buku koleksi perpustakaan umum maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Didalam teknik pengambilan data, digunakan beberapa teknik pengambilan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian (Tika, 2005: 44). Metode ini digunakan peneliti dalam rangka untuk mendapatkan data awal yang menyangkut daerah peneliti tentang keadaan Pantai Indrayanti dan keadaan masyarakat secara riil di daerah peneliti. Pada metode observasi menggunakan Chek List, yaitu suatu daftar berisi nama objek atau fenomena yang akan diteliti atau diamati. Peneliti tinggal memberi tanda setiap pemunculan gejala yang akan diamati.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan peneliti (Tika, 2005: 44). Wawancara ini ditujukan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta perangkatnya.

3. Kuisisioner

Menurut sugiyono (2013: 199) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis kuisisioner yang digunakan yaitu kuisisioner tertutup adalah jenis kuisisioner yang jawabannya sudah ditentukan.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009:329). Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh

data sekunder yang berupa data organisasi pemerintah desa, arsip kewenangan pemerintah desa dan data pengelolaan keuangan desa.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode analisis deskriptif yang di gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Sumadi Surjabrata (dalam Sudjarwo, 2001:52). Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat proses sampai akhir, dari sesuatu permasalahan yang diamati.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberi gambaran dan deskripsi mengenai sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan desa, kemudian memberikan kuisisioner tertutup kepada responden yaitu Kepala desa beserta perangkatnya dengan kategori pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Selanjutnya dilakukan penskoran terhadap jawaban dari responden. Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai, untuk jawaban “Ya” nilai skor =1, dan “Tidak” nilai skor = 0. Penskoran ini berdasarkan ketentuan dari Skala Guttman. Menurut Sugiyono (2014:139) “Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain” Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Seluruh Responden}} \times 100$$

Kriteria penentuan untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, peneliti menggunakan ketentuan kategorial yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:184) adalah:

Tabel 2. Kriteria Penentuan Persentase Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Persentase (%)	Kriteria
0 – 19,9	Pengendalian internal sangat sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
20 – 39,9	Pengendalian internal sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
40 – 59,9	Pengendalian internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
60 – 79,9	Pengendalian internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi
80 - 100	Pengendalian internal sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi

Sumber : Sugiyono, 2010 : 184

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya. Fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata

Pengukuran peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dalam meminimalisir potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan penelitian ini penyebaran kuisisioner di sampaikan kepada seluruh perangkat desa sebanyak 9 kuisisioner dan seluruhnya kembali. Jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, yaitu dengan memberikan pilihan jawaban Ya dan Tidak. Untuk pertanyaan dengan jawaban Ya di beri skor 1 dan untuk pertanyaan dengan jawaban Tidak di beri skor 0. Seluruh jawaban yang telah di berikan oleh responden, kemudian diolah menggunakan Rumus : Jumlah jawaban Ya di bagi dengan jumlah jawaban seluruh responden dan dikalikan 100%.

Pada kuisisioner yang disebar, jumlah pertanyaan seluruhnya adalah sebanyak 62 pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden dengan pilihan jawaban Ya dan Tidak. Hasil pengolahan kuisisioner adalah sebagai berikut:

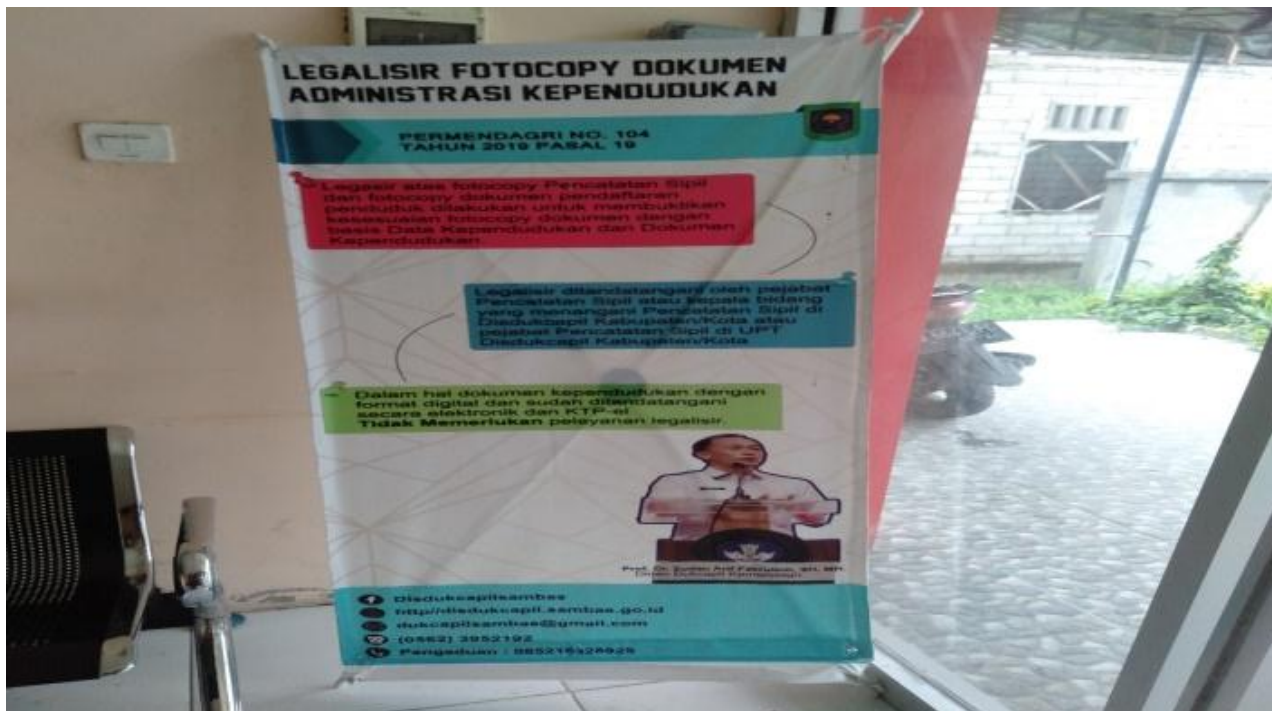
Tabel 3. Hasil analisis 5 komponen Pengendalian internal

No	Komponen Pengendalian Internal	Capaian Peranan Pengendalian Internal	Kesimpulan
1	Lingkungan Pengendalian	72.69%	Berperan
2	Penilaian Risiko	57.58%	Cukup Berperan
3	Aktivitas Pengendalian	63.49%	Berperan
4	Informasi Dan Komunikasi	70.83%	Berperan
5	Pemantauan Pengendalian Internal	68.89%	Berperan
6	Peran 5 Komponen secara bersama	67.38%	Berperan

Sumber : Data olahan

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa capaian peran lingkungan pengendalian pada sistem pengendalian internal adalah sebesar 72,69% atau masuk pada kategori berperan. Beberapa hal yang menyebabkan masih belum optimalnya peran lingkungan pengendalian terhadap kecenderungan munculnya potensi kecurangan adalah karena pemerintah desa masih belum memiliki standar prilaku dan kode etik. Demikian juga apabila terjadi tindakan pelanggaran belum dikomunikasikan secara luas kepada aparatur desa untuk menimbulkan efek jera, akan tetapi lebih pada pendekatan secara personal. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa beliau menyampaikan terkait prilaku aparat desa yang ada ” ada aparat yang bekerja bagus, akan tetapi kurang jujur, misalnya meminta imbalan kepada masyarakat atas jasa pengurusan surat menyurat tertentu misalnya izin usaha padahal tidak diatur didalam Peraturan Desa. Terhadap aparat tersebut telah dilakukan teguran secara lisan agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut . Selanjutnya kepala desa menyampaikan mengapa aparat desa tersebut berperilaku demikian, ternyata karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena penghasilan yang didapat belum mencukupi ”. Kemudian belum tersedianya SOP yang cukup untuk melakukan prosedur pengendalian. Untuk SOP pelayanan administrasi lainnya belum di susun karena belum memahami bahwa SOP adalah penting sebagai salah satu alat pengendalian dari sistem pengendalian internal. SOP yang ada hanya terkait legalisir fotocopy dokumen administrasi kependudukan, seperti tampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Legalisir Fotocopy Dokumen Administrasi Kependudukan

2. Penilaian Risiko

Sistem pengendalian internal dilihat dari komponen penilaian risiko memiliki tingkat capaian sebesar 57,58%. Dengan demikian nilai tersebut masuk dalam range penilaian 40 % - 59,9% dengan kriteria bahwa pengendalian internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi. Beberapa hal yang menyebabkan peran pengendalian internal dilihat dari aspek penilaian risiko belum optimal adalah aparat pemerintah desa belum seluruhnya memahami visi, misi dan tujuan organisasi dan pemerintah desa belum sepenuhnya melakukan Pembatasan akses terhadap pegawai desa yang akan mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut Kepala Desa bahwa” Sosialisasi disampaikan hanya pada saat rapat tahunan dengan perangkat desa”. Selanjutnya menurut kepala desa terkait Kegiatan pada setiap Bidang direviu/ditelaah hanya setahun sekali “ Kemudian terhadap tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada aparatur desa, menurut kepala desa bahwa” setiap aparatur desa Diberikan tugas sesuai tupoksi, cuma kadang tidak dilaksanakan dan diambil alih oleh kades untuk menyelesaikannya “

3. Aktivitas Pengendalian

Sistem pengendalian internal dilihat dari komponen aktivitas pengendalian memiliki tingkat capaian sebesar 63,49%. Dengan demikian nilai tersebut masuk dalam range penilaian 60 % - 79,9% dengan kriteria bahwa pengendalian internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi. Beberapa hal yang menyebabkan peran pengendalian internal dilihat dari aspek aktivitas pengendalian karena belum memadainya mekanisme reviu pada setiap tingkatan manajemen dalam menilai kinerja suatu aktivitas atau fungsi terhadap rencana yang telah ditetapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem Pengendalian internal dilihat dari komponen Informasi dan komunikasi memiliki tingkat capaian sebesar 70,83%. Dengan demikian nilai tersebut masuk dalam range penilaian 60 % - 79,9% dengan kriteria bahwa pengendalian internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi. Beberapa hal yang menyebabkan peran pengendalian internal dilihat dari aspek Informasi dan komunikasi diantaranya belum tersedianya saluran informasi yang efektif untuk menyampaikan informasi seandainya terjadi penyimpangan seperti wistle Blowing system. Menurut kepala desa bahwa “Selama ini seandainya ada laporan dugaan penyimpangan kadang langsung ke kades, kadang melalui BPD, kadang ada pemeriksaan pembinaan oleh Inspektorat”

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilihat dari komponen pemantauan pengendalian internal memiliki tingkat capaian sebesar 68,89%. Dengan demikian nilai tersebut masuk dalam range penilaian 60 % - 79,9% dengan kriteria bahwa pengendalian internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi. Beberapa hal yang menyebabkan peran pengendalian internal dilihat dari aspek Pemantauan dan pengendalian diantaranya Pemerintah Desa masih belum mempunyai metode pemantauan yang memadai untuk kegiatan pengendalian dan Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara aktif dalam pemantauan (on-going monitoring) atas operasional organisasi Pemerintah Desa. Selanjutnya Pimpinan Desa secara rutin memantau jalannya operasional organisasi dan hasil pemantauan tidak didokumentasikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan Peran 5 (lima) Komponen secara bersama adalah katagori berperan yang memiliki tingkat capaian sebesar 67.38%. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan informasi akuntansi dan pemantauan secara bersama-sama berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.
2. Hasil perhitungan lingkungan pengendalian sebesar 72,69% berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.
3. Hasil perhitungan penilaian risiko sebesar 57,58% cukup berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.
4. Hasil perhitungan aktivitas pengendalian memiliki tingkat capaian sebesar 63,49% berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.
5. Hasil perhitungan Informasi dan komunikasi memiliki tingkat capaian sebesar 70,83% berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.
6. Hasil perhitungan komponen pemantauan pengendalian internal memiliki tingkat capaian sebesar 68,89% berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Empat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Aparat desa setidaknya memiliki standar perilaku dan kode etik secara tertulis dan nantinya disosialisasikan kepada aparat desa.
2. Seluruh aparat pemerintah desa setidaknya memahami visi, misi dan tujuan organisasi dan pemerintah desa sehingga bisa melakukan pembatasan akses terhadap pegawai desa yang akan mengelola sumber daya yang dimiliki.
3. Aparat desa setidaknya memiliki mekanisme revidu pada setiap tingkatan manajemen dalam menilai kinerja suatu aktivitas atau fungsi terhadap rencana yang telah ditetapkan.
4. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam pemantauan (on-going monitoring) atas operasional organisasi Pemerintah Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfaruqi. (2019). *Analisis Potensi Kecurangan dalam pengelolaan Keuangan Desa*, *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Volume 11 nomor 2, November 2019.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Report To The Nations On Occupational Fraud and Abuse*. U.S. ACFE
- Mitriza, dan Akbar. (2019). *Analisis Pengendalian Potensi Fraud di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Moechtar Bukittingg*, *Jurnal Kesehatan Andalas*.
<http://Jurnal.unand.ac.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Professional Education Services,LP. (2010). *Auditing for Fraud Detection*, 4208 Douglas Blvd. Suite 50. Granite Bay, CA 95746
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Utami. (2019). *Fraud Pentagon dalam mendeteksi risiko kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2016 – 2018*. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 tahun 2019*.
<https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/13/korupsi-anggaran-desa-tertinggi-diantara-sektor-lain>